



**LAPORAN DIPLOMASI PARLEMEN BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG BAHAN KIMIA KE REPUBLIK BOLIVARIAN VENEZUELA  
18 - 24 AGUSTUS 2022**

**A. LATAR BELAKANG**

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bahwa kehidupan manusia tidak lepas dari pemanfaatan bahan kimia yang berkaitan erat dengan sektor ekonomi produktif. Industri bahan kimia memiliki peran penting untuk memasok kebutuhan bahan baku bagi sektor industri, pertanian, kesehatan termasuk farmasi, pertambangan, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya. Namun demikian apabila pemanfaatan bahan kimia tidak dilakukan secara benar dan bijak dapat menjadi ancaman terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Semakin menipisnya sumber daya alam juga menjadi salah satu faktor yang memaksa industri bahan kimia menggunakan pendekatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Bahan kimia merupakan suatu zat atau senyawa dengan susunan molekul tertentu berbentuk tunggal atau campuran berwujud padat, cair, atau gas yang berasal dari alam maupun hasil proses produksi. Daur hidup bahan kimia meliputi produksi/pengadaan, penyimpanan, transportasi, distribusi, penggunaan/pemanfaatan, daur ulang dan/atau pemusnahan. Penggunaan/pemanfaatan bahan kimia dalam industri harus dilakukan secara tepat dan wajib

mempertimbangkan aspek lingkungan dan kesehatan, oleh karenanya pengaturan mengenai bahan kimia dari hulu ke hilir menjadi suatu keniscayaan. Termasuk harmonisasi penggunaan label dan kemungkinan penyalahgunaan bahan kimia secara tidak bertanggungjawab.

Medio 2022, diberitakan bahwa salah satu jenama ternama produk mi instan kemasan Indonesia ditolak oleh pemerintah Taiwan karena terdeteksi mengandung residu pestisida yang berlebihan. Setelah diperiksa, ternyata terdapat regulasi baru yang diterapkan oleh negara Taiwan.

Secara internasional, upaya untuk mengatur dan mencegah penyalahgunaan bahan kimia secara global diawali oleh PBB pada tahun 1992 dengan *Globally Harmonized System of Classification and Labeling* (GHS). GHS merupakan cara untuk menstandarisasi manajemen bahan kimia di seluruh dunia. Sistem ini bertujuan untuk memastikan pelabelan, komunikasi, klasifikasi yang konsisten secara internasional dan membuat perdagangan dan pergerakan bahan kimia menjadi tugas yang lebih mudah yang saat ini diterapkan di sekitar 65 negara.

Edisi revisi kesembilan dari GHS (GHS Rev. 9) merupakan revisi terbaru yang diterbitkan pada tahun 2021. Selain itu, berbagai upaya mereduksi risiko bahaya bahan kimia juga banyak dilakukan melalui konvensi atau traktat internasional, antara lain Protokol Montreal (bahan perusak ozon), Konvensi Stockholm (*Persistent Organic Pollutants*), Konvensi Rotterdam 2004 (*Prior Informed Consent/PIC of Hazardous Chemicals*), Konvensi Basel (perpindahan lintas batas limbah berbahaya), dan lain-lain. Secara regional, beberapa kawasan melakukan pengaturan terkait ekspor bahan kimia ke negara tujuan sebagai tindak lanjut dari program PBB yaitu *Strategic Approach to International Chemical Management/SAICM*, misalnya Masyarakat

Ekonomi Eropa (MEE), Republik Rakyat Tiongkok dan Korea tahun 2008 memberlakukan *REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals)*. Chemical Authorization Management Program (CHAMP) yang berlaku 2009 di Amerika Serikat, yang semuanya dilakukan untuk melindungi masyarakat di kawasan tersebut.

Di Indonesia, saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai bahan kimia. Pengaturan mengenai bahan kimia yang saat ini berlaku antara lain terdapat dalam:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika; dan
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari berbagai undang-undang yang mengatur mengenai bahan kimia tersebut terdapat kewenangan yang berbeda dalam melakukan penyelenggaraan/pengelolaan bahan kimia. Hal tersebut menjadi kelemahan dalam regulasi terkait bahan kimia karena tidak ada pembagian yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai bahan kimia.

Berdasarkan uraian di atas, pembentukan RUU tentang Bahan Kimia merupakan amanat konstitusi yang perlu segera diwujudkan. Badan Legislasi mendapatkan tugas untuk melakukan penyusunan

Naskah Akademik dan rancangan undang-undangnya. Terkait dengan hal tersebut, Badan Legislasi telah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri sebagai pelaksanaan diplomasi parlemen dalam rangka memperkaya materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia (RUU tentang Bahan Kimia).

RUU tentang Bahan Kimia merupakan RUU usulan DPR yang tercantum dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022. Beberapa substansi yang diatur dalam RUU tentang Bahan Kimia adalah:

1. Definisi;
2. Ruang lingkup;
3. Penyelenggaraan/pengelolaan Bahan Kimia, meliputi Penetapan Kebijakan; Perizinan Berusaha; Pengaturan Produksi, Distribusi, Kemasan, dan Label; serta Pengawasan menyangkut lembaga mana yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap institusi yang diberi kewenangan;
4. Sistem Informasi Bahan Kimia;
5. Riset dan Pengembangan;
6. Partisipasi Masyarakat;
7. Sanksi Administratif;
8. Larangan bagi setiap orang yang tanpa hak menyalahgunakan peruntukan bahan kimia selain untuk tujuan asalnya; dan
9. Ketentuan Pidana. Ancaman pidana bagi setiap orang yang tanpa hak menyalahgunakan peruntukan bahan kimia.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Kunjungan kerja sebagai pelaksanaan Diplomasi Parlemen ke negara Republik Bolivarian Venezuela diharapkan memperoleh manfaat terutama untuk menyempurnakan RUU tentang Bahan Kimia sehingga pada saatnya RUU ini diundangkan dapat memberikan pengaturan bahan kimia yang optimal, harmonis, terintegrasi, dan berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan nasional dan sesuai dengan kebijakan Internasional.

### C. SUSUNAN ANGGOTA DELEGASI

Susunan Anggota Delegasi Diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI ke negara Republik Bolivaria Venezuela adalah sebagai berikut:

NO.	NO ANG	N A M A	FRAKSI	KETERANGAN
1	472	ACHMAD BAIDOWI	PPP	KETUA DELEGASI/ WK. KETUA BALEG
2	128	SUPRATMAN ANDI AGTAS	GERINDRA	KETUA BALEG
3	175	M. NURDIN	PDIP	WK. KETUA BALEG
4	383	WILLY ADITYA	NASDEM	WK. KETUA BALEG
5	4	ABDUL WAHID	PKB	WK. KETUA BALEG
6	156	STURMAN PANJAITAN	PDIP	ANGGOTA BALEG
7	158	SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON	PDIP	ANGGOTA BALEG
8	303	FIRMAN SOEBAGYO	GOLKAR	ANGGOTA BALEG
9	300	FERDIANSYAH	GOLKAR	ANGGOTA BALEG
10	85	HERI GUNAWAN	GERINDRA	ANGGOTA BALEG
11	108	SUMAIL ABDULLAH	GERINDRA	ANGGOTA BALEG
12	359	TAUFIK BASARI	NASDEM	ANGGOTA BALEG
13	21	MOHAMMAD TOHA	PKB	ANGGOTA BALEG
14	537	SANTOSO	PD	ANGGOTA BALEG
15	447	AMIN AK	PKS	ANGGOTA BALEG
16	497	DESY RATNASARI	PAN	ANGGOTA BALEG
17	-	DYAH RENOWATI	SEKRETARIAT	
18	-	RUSLI MUHAMMAD ZEIN		
19	-	ADI SETIANI	TENAGA AHLI	

#### D. SEKILAS MENGENAI NEGARA REPUBLIK BOLIVARIA VENEZUELA

Nama Negara.	Republik Bolivariana Venezuela ( <i>República Bolivariana de Venezuela</i> ).
Ibu Kota.	Caracas.
Perbedaan Waktu dengan Jakarta.	11,5 jam lebih lambat daripada Jakarta.
Letak Geografis.	Amerika Selatan.
Luas Wilayah.	912.050 km <sup>2</sup> .
Organisasi Kewilayahan.	23 Negara Bagian, 1 <i>capital district</i> dan 1 <i>federal dependency</i> (11 gugus kepulauan).
Jumlah penduduk.	28.047.938 (2011).
Bentuk Negara.	Federal.
Bentuk Pemerintahan.	Republik Federal.
Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.	Presiden Nicolas Maduro Moros (hasil Pemilu tanggal 14 April 2013).
Menteri Luar Negeri	Elias Jaua Milano.
Menteri Energi dan Perminyakan merangkap Presiden <i>Petróleos de Venezuela, S.A</i> (PDVSA).	Rafael Ramírez Carreño.
Parlemen.	Unikameral ( <i>National Assembly</i> ). Terdiri dari 165 kursi.
Bahasa Nasional.	Spanyol.
Sumber Alam Utama.	Minyak bumi, gas alam, biji besi, emas, bauksit, bahan mineral, air. Sekitar 90% ekspornya merupakan minyak bumi dengan total produksi rata-rata 2,4 juta barel/hari (2011) atau ke-14 terbesar di dunia. Cadangan minyak bumi: 209,4 milyar (2012) atau ke-tiga terbesar di dunia. Cadangan gas: 5,5 trilyun Kubik meter (2012) atau ke-sembilan terbesar di dunia.

Lagu Kebangsaan.	<i>Gloria al bravo pueblo</i> ( <i>Glory to the Brave Nation</i> ).
Hari Kemerdekaan.	5 Juli 1811 (dari Spanyol).
Mata Uang.	Bolivares Fuerte (Bs). Nilai tukar US\$ 1 = 6,3 Bolivares Fuerte (sejak 8 Pebruari 2013; devaluasi ke-5 dalam 12 tahun).
GDP (PPP).	2012 : US\$ 402 milyar. 2011 : US\$ 380,2 milyar.
GDP per kapita (PPP).	2012 : US\$ 13,200. 2011 : US\$ 12.800.
Komposisi GDP.	Pertanian 3,7%; Industri 35,3%; Jasa 61%.
Tingkat inflasi.	2012 : 20,9%. 2011 : 26,1%.
Tingkat Pengangguran	8% (2012).
Hutang Luar Negeri.	US\$ 63,74 milyar (2012); US\$ 89,6 milyar (2011).
Pertumbuhan Ekonomi.	5,6% (2012).

Nilai Ekspor.	US\$ 92,6 milyar.
Nilai Impor.	US\$ 56,7 milyar.
Produk Ekspor Terbesar.	Minyak bumi, Bauksit, Aluminium, bahan tambang, produk kimia, pertanian dan industri dasar.
Negara Tujuan Ekspor Terbesar.	Amerika Serikat (40%), China (10%), India (5,5%), Kuba (4%) (2012).
Produk Impor Terbesar.	Produk pertanian, peternakan, bahan mentah, mesin dan peralatan mesin, peralatan transportasi, bahan konstruksi, peralatan kedokteran, farmasi, kimia, besi dan produk besi.
Negara Asal Impor Terbesar.	Amerika Serikat (28%), China (15%), Brasil (10%).
Kebijakan Perdagangan.	Kontrol devisa yang ketat. Melarang pembukaan rekening Dolar AS.
Kebijakan Investasi.	Nasionalisasi (Pemerintah sebagai pemilik saham mayoritas untuk seluruh investasi asing, minimal 50%).
Keikutsertaan dalam Organisasi Internasional.	ALBA, PetroCaribe, PBB, Caricom (Pengamat), CELAC, CDB, FAO, G-15, G-24, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCs, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ITSO, ITU, ITUC, LAES, LAIA, LAS (Pengamat), Mercosur (Asosiasi), MIGA,

	NAM, OAS, OPANAL, OPCW, OPEC, PCA, RG, UNASUR, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, Union Latina, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO.
--	--

## **E. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kunjungan kerja sebagai pelaksanaan Diplomasi Parlemen ini dilaksanakan tanggal 18 sampai dengan 24 Agustus 2022. Delegasi Diplomasi Parlemen melakukan pertemuan dengan Asosiasi Bahan Kimia Venezuela, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kedutaan Besar RI di Caracas.

## **F. HASIL KEGIATAN**

### **I. Pertemuan dengan *Venezuelan Association of The Chemical and Petrochemical Industry (ASOQUIM)***

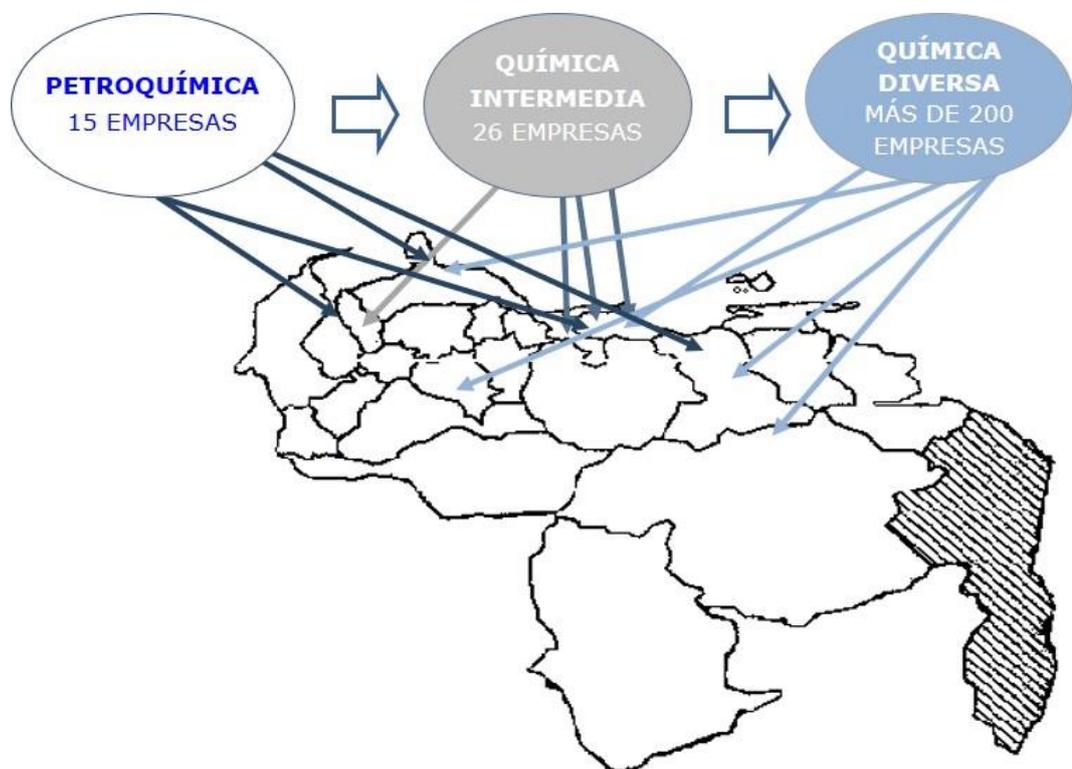
ASOQUIM adalah asosiasi sipil yang beranggotakan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri kimia dan petrokimia di Venezuela. ASOQUIM didirikan pada 7 Mei 1963, dengan tujuan "mempromosikan dan membantu pendirian, pengembangan, dan penguatan industri kimia di Venezuela".

ASOQUIM berkomitmen untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, inovasi dan praktik lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja yang baik untuk mendukung industri kimia dan petrokimia Venezuela, sebagai salah satu sektor produktif paling penting negara, basis untuk pertumbuhan sektor manufaktur yang tak terhitung jumlahnya dari industri transformasi. Sampai saat ini, ASOQUIM memiliki 155 (seratus lima puluh lima) anggota, 107 merupakan perusahaan industri bahan kimia dan 48 lainnya bergerak di bidang perdagangan dan jasa.

Industri kimia dan petrokimia di Venezuela lahir dari tahun 1930, sebagai industri kerajinan yang produk pertamanya adalah sabun, lilin, dan korek api. Dua dekade berikutnya perusahaan modal swasta dengan tingkat industrialisasi dan transformasi yang lebih tinggi memproduksi deterjen, produk pembersih dan cat.

Selama Tahun 30-an, pembuatan produk farmasi dan perlengkapan mandi dipromosikan. Dari tahun 1945 hingga 1959, pedoman untuk pertumbuhan dan diversifikasi industri kimia Venezuela ditetapkan dengan munculnya perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi sabun dan perlengkapan mandi, gas industri, dan cat.

Sejak tahun 1961, produk-produk kimia, seperti cat, kosmetik, pengawet, obat-obatan, dan lain-lain, sudah menjadi hal biasa dalam kehidupan sehari-hari. Sampai saat ini, pusat industri kimia dan petrokimia utama Venezuela terletak di sebelah utara, dekat pantai.



Di Venezuela, industri bahan kimia dibagi menjadi beberapa segmen sebagaimana di bawah ini:

A. PETROCHEMISTRY terbagi ke dalam sub-segmen sebagai berikut:

1. Olefins and thermoplastic resins
2. Basic petrochemicals
3. Basic inorganics and fertilizers.

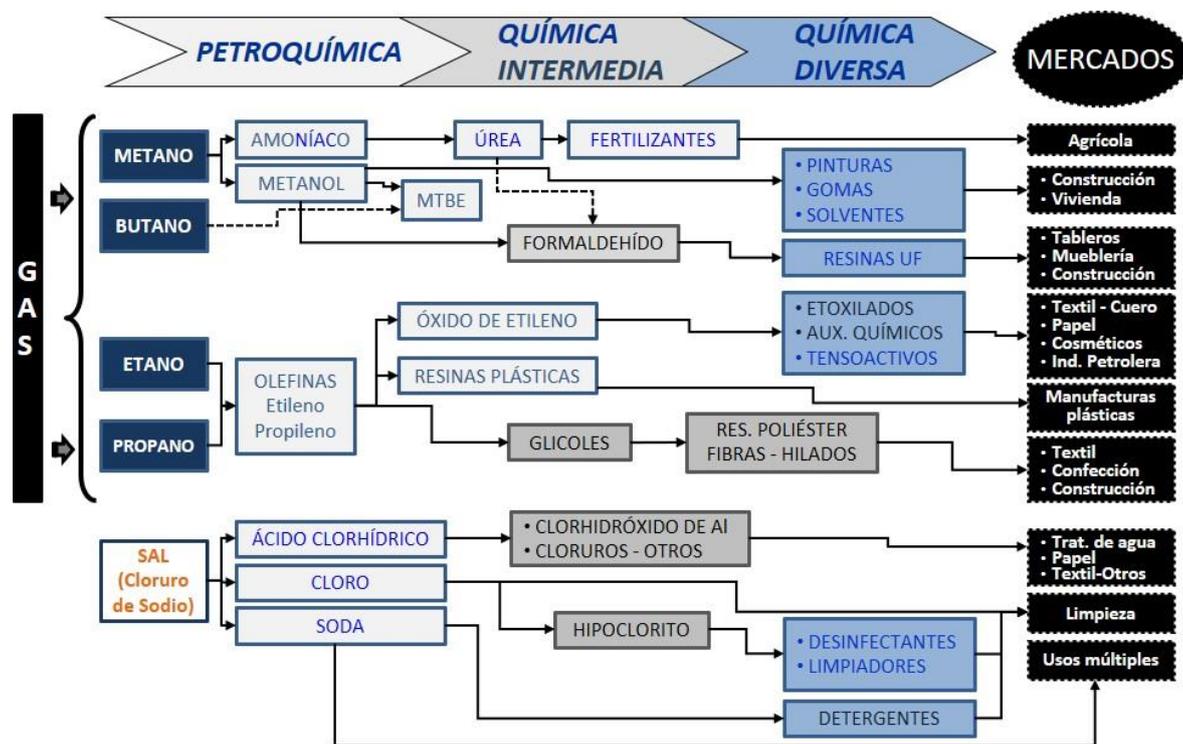
B. INTERMEDIATE CHEMISTRY terbagi ke dalam sub-segmen sebagai berikut:

1. various organic
2. man-made or synthetic fibers
3. Various inorganics

C. MISCELLANEOUS CHEMISTRY terbagi ke dalam sub-segmen sebagai berikut:

1. Auxiliary resins and plasticizers
2. Specialties
3. Final products

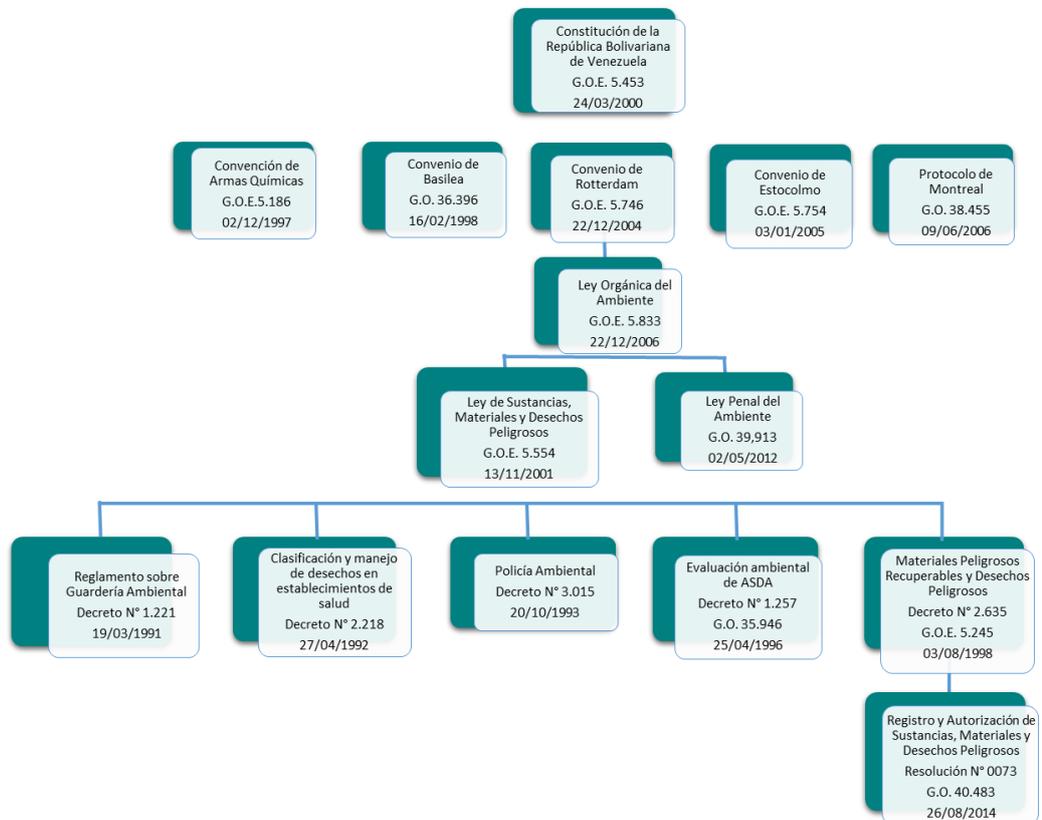
Berikut adalah skema rantai distribusi dan pasar bahan kimia nasional di Venezuela



## SECTORS IT SUPPLIES



Hirarki peraturan perundang-undangan terkait bahan kimia di Venezuela



## **II. Pertemuan dengan Kementerian Kesehatan Republik Bolivaria Vebezuela**

Bertempat di gedung Kementerian Luar Negeri, Director General Del Despacho De Asia, Medio Oriente, Y Oceania, Pedro Rodriguez Aray dan Directora General De La Contral Oria Sancanea Del Ministerio Del Poder Popular Para La Salud, Marliz Diaz Fuentes (Kementerian Kesehatan Venezuela) memaparkan tentang visi, misi, tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan, yaitu:

### Visi

Melembagakan penatagunaan dan penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat Nasional; melaksanakan kebijakan strategis untuk promosi, pencegahan, pengawasan, pengendalian, pengaturan, rehabilitasi dan pemulihan kesehatan yang efektif dan aman; menjamin akses tepat waktu ke jaringan layanan; memastikan lingkungan yang sehat; mempromosikan penelitian, ilmu pengetahuan, teknologi dan pengembangan manusia serta produksi pasokan kesehatan dengan universalitas, kesetaraan, solidaritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kecepatan dalam mengejar kualitas hidup penduduk Venezuela, dengan cara yang diartikulasikan bersama yaitu tanggung jawab dan partisipatif.

### Misi

Di bawah pengawasan Sistem Kesehatan Masyarakat Nasional yang baru dibuat, MPPS mengimplementasikan dan mengawasi jaringan perawatan pemerintah untuk:

- Menjadikan Hak dan Kesamaan Sosial sebagai landasan tatanan sosial baru, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.
- Memerangi ketidakadilan, mengurangi defisit perhatian dan kesenjangan antara kelompok manusia dan wilayah.
- Menyelamatkan apa yang menjadi milik publik berdasarkan kepentingan kolektif, memberdayakan warga dengan

kapasitas dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang berdampak pada pembangunan sosial negara.

Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Kesehatan meliputi:

- kesehatan manusia yang komprehensif;
- Sistem Kesehatan Masyarakat Nasional;
- Pengawas Sanitasi;
- perbekalan, obat-obatan dan produk biologi untuk kesehatan;
- pelayanan veteriner yang berkaitan dengan kesehatan manusia;
- pengaturan dan pengendalian pelaksanaan profesi yang berkaitan dengan kesehatan, baik secara pribadi maupun umum; dan
- regulasi dan pengawasan klinik swasta.

Berkaitan dengan bahan kimia di Venezuela, Venezuela memiliki undang-undang organik tentang Kesehatan yang mengatur tentang kewajiban bagi produk-produk yang beredar menjamin Kesehatan masyarakat. Dalam rangka memastikan keamanan produk bagi Kesehatan masyarakat, pemerintah Venezuela memiliki sistem pengawasan yang sifatnya nasional yang mengawasi produk-produk termasuk tempat penampungannya. Pengawasan juga dapat dilakukan oleh organisasi farmasi Venezuela termasuk pengawasan perpajakan. Hal ini juga berlaku bagi produk makanan, kosmetik dan turunannya.

### **III. Pertemuan Dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Caracas**

Delegasi Diplomasi Parlemen Badan Legislatif DPR RI diterima oleh Duta Besar RI Mayjend. TNI. (Purn.) Imam Edy Mulyono. Pada kesempatan tersebut Duta Besar sangat mengapresiasi tujuan diplomasi parlemen, karena Venezuela memiliki hubungan yang baik dengan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes RI juga menyampaikan penjelasan mengenai perkembangan terkini dalam hubungan bilateral Indonesia-Venezuela termasuk keinginan Venezuela untuk menjadi negara observer di Asia.

## **G. SIMPULAN**

- Saat ini Republik Bolivaria Venezuela belum memiliki undang-undang khusus tentang bahan kimia (masih dalam tahap persiapan).
- Walaupun belum ada undang-undang yang mengatur mengenai bahan kimia secara khusus, tata kelola bahan kimia di Venezuela tetap dapat dilakukan dengan baik karena dilakukan secara bersama oleh kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan, tenaga kerja, pendidikan, lingkungan hidup, dan luar negeri.
- Perhatian masyarakat secara umum dan organisasi sipil bahan kimia Venezuela secara khusus menjadi bagian dari mekanisme pengawasan pengelolaan bahan kimia di Venezuela.

## **H. SARAN**

- Perlu kejelasan siapa melakukan apa dalam penyelenggaraan dan pengelolaan bahan kimia, sehingga koordinasi dapat dilakukan secara optimal dan efektif.
- perlu harmonisasi dan konsistensi perumusan norma perundang-undangan, mengingat hal-hal yang berkaitan juga diatur secara tersendiri berdasarkan undang-undang lain, seperti perindustrian, kesehatan, narkotika, psiktropika, cukai, perlindungan konsumen, dan lingkungan hidup.

#### **IV. PENUTUP**

Demikian Laporan Diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI ke Republik Bolivaria Venezuela. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

**JAKARTA, AGUSTUS 2022**  
**DELEGASI DIPLOMASI PARLEMEN BADAN LEGISLASI DPR RI**  
**KETUA DELEGASI,**

**ACHMAD BAIDOWI**  
**A-427**

LAMPIRAN:

- Paparan ASOQUIM
- <https://asoquim.com/industria-quimica-venezolana/>
- <https://asoquim.com/marco-legal/>